

## RENCANA AKSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Langkah Aksi	Indikator	Target Kinerja				Satuan	Anggaran (Rp.)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau			Tepat Waktu		Tepat Waktu	
		Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD				20	%	
		Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD				10	%	
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau				Tepat Waktu	Tepat Waktu	
		Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan		1	1		Dokumen	
		Persentase SPM yang diterbitkan SP2D				100	Persen	
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM				2	hari	
		Rasio likuiditas Pemprov Riau				100	Persen	
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat Waktu				Tepat Waktu	
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			WTP		WTP	
		Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu		100			Persen	
		Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan				2	Persil	
		Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses				100	Persen	
		Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses				10	Usulan	
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi				11,52	%	
		Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah				100	Persen	
<b>5 02 02</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	25	25	25	25	Persen	<b>1,957,113,982,607</b>
5 02 02 101	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	25	25	25	25	Persen	3,103,517,580
5 02 02 101 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			6	6	Dokumen	374,061,500
5 02 02 101 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			5	5	Dokumen	938,906,500
5 02 02 101 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah	25	25	25	25	Persen	346,186,287
5 02 02 101 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1	Dokumen	104,038,975



No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Langkah Aksi				Indikator	Target Kinerja				Satuan	Anggaran (Rp.)			
						TW I	TW II	TW III	TW IV					
5	02	02	103		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12	Dokumen	242,147,312		
5	02	02	103	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	25	25	25	25	Persen	242,147,312		
5	02	02	103	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				7	7	Laporan	338,069,980	
5	02	02	104		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2		Dokumen	584,800,270	
5	02	02	104	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					1	Dokumen	234,772,145	
5	02	02	104	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi					33	Orang	168,634,990	
5	02	02	104	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	25	25	25	25	Persen	1,951,215,462,159		
5	02	02	104	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					1	Laporan	424,305,869,300	
5	02	02	105		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak					1	Laporan	52,693,430,861	
5	02	02	105	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi					1	Laporan	1,474,216,161,998	
5	02	02	105	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	25	25	25	25	Persen	429,083,325		
5	02	02	105	10	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					1	Dokumen	429,083,325	
5	02	02	106		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dikelola	25	25	25	25	Persen	3,501,826,781		
5	02	02	106	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	25	25	25	25	Persen	3,501,826,781		
5	02	03	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			Tersedianya Standar Harga					1	Dokumen	299,954,000	
5	02	03	101		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					1	1	Dokumen	188,999,225
5	02	03	101	01	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					1	Dokumen	200,480,593	
5	02	03	101	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	1	2	2	2	Laporan	387,607,955		



No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Langkah Aksi					Indikator	Target Kinerja				Satuan	Anggaran (Rp.)
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
5	02	03	101	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah			1		Laporan	1,626,607,159
5	02	03	101	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah			1		Laporan	301,499,458
5	02	03	101	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			1		Laporan	159,299,640
5	02	03	101	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			1	1	Dokumen	109,224,710
5	02	03	101	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			1	1	Laporan	120,154,806
5	02	03	101	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	1	2	2	2	Laporan	107,999,235
5	02	03	101	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi			50	50	Persen	
5	02	03	101	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD				91,66	%	
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi			12		Ranperda Kab / Kota	
						Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD			50	50	Persen	
						Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	25	25	25	25	Persen	693,455,871
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			6	6	Laporan	227,277,321
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	25	25	25	25	Persen	<b>1,957,113,982,607</b>
5	02	02	102		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			6	6	Laporan	177,721,605
5	02	02	102	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			12		Laporan	116,489,565
5	02	02	102	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				12	Laporan	171,967,380



No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Langkah Aksi				Indikator	Target Kinerja				Satuan	Anggaran (Rp.)	
						TW I	TW II	TW III	TW IV			
5	02	02	102	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			12		Laporan	116,489,565
5	02	02	102	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				12	Laporan	171,967,380

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



ANDRA, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721115 199803 1 004